



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) untuk periode selama 1 (satu) tahun sebagai langkah strategis dalam mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang ingin capai dalam perencanaan jangka menengah.

Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan terjemahan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan serta mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

Dan untuk mendukung visi misi Bupati Kutai Kartanegara tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara;
24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 Tanggal 5 Juli 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk mewujudkan sinergitas antar Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Pengikat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

b. Tujuan

1. Menyediakan Dokumen Perencanaan Tahunan DPMPSTSP yang akan dilaksanakan Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Menyediakan Sarana Pengendalian Program dan kegiatan Tahun 2025;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional serta tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Program dan Kegiatan berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta tabel rencana program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Katanegara pada Tahun 2023 menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Setiap program selanjutnya disusun dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung. Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menunaikan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai organisasi perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, setiap program dan kegiatan dibebani suatu indikator kinerja. Program dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (outcome) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (output). Target capaian kinerja ditetapkan dalam renstra untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam renja.

Tahap berikutnya diuraikan rangkaian pengukuran kinerja pengelolaan sumber daya keuangan berdasarkan sasaran strategis jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Realisasi Investasi

Sasaran 1 ditunjang dengan 6 (enam) Program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan, berikut capaian kinerja Sasaran 1 tersaji dalam tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1.
Sasaran 1 Perangkat Daerah

Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Realisasi Investasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	80	94,96	118,7

Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Daerah Kabupaten/Kota				
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Proyek	640	1703	266,09
	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	260	284	109,23
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan dan Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	30,47	51,38	168,62

Sumberdata: E-Pantau Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2023

Dilihat dari pencapaian Sasaran 1 kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bisa dikategorikan “Sangat Baik”. Target realisasi investasi tahun 2023 ditetapkan pencapaiannya sebesar Rp 14,80 Triliun. Dimana Realisasi Investasi ini tercatat, dengan rincian realisasi PMDN sebesar Rp 9,80 Triliun (1699 proyek) dan realisasi PMA sebesar Rp 5,00 Triliun (229 proyek).

Dilihat berdasarkan sektor usaha maka realisasi investasi PMDN yang dapat dicapai sampai dengan tahun 2023 menunjukkan subsektor Pertambangan yang menunjukkan capaian realisasi terbesar Rp. 7,89 Milyar

Penyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 9.659 orang dan 25 orang. Walaupun dalam pencapaian sasaran ini kami harus melakukan penambahan anggaran dikarenakan anggaran murni kami masih kurang untuk pencapaian output guna menjalankan paket-paket pekerjaan dalam pencapaian target.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran 2 ini ditunjang dengan 2 (Dua) program dan 2 (Dua) kegiatan, berikut capaian kinerja Sasaran 2 tersaji dalam tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2.
Sasaran 2 Perangkat Daerah

Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Izin	1000	12.796	1279,60
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Aplikasi	3	4	133,33

Sumberdata: E-Pantau Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2023

Dilihat dari pencapaian Sasaran 2 kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bisa dikategorikan “Sangat Baik”. Walaupun dalam pencapaian sasaran ini kami juga harus melakukan penambahan anggaran dikarenakan anggaran murni kami masih kurang untuk pencapaian output guna menjalankan paket-paket pekerjaan dalam pencapaian target. Ditambah dengan adanya MPP (Mal Pelayanan Publik) yang baru berjalan dengan beban anggarannya masuk pada sasaran kegiatan ini.

Berdasarkan Reviu Hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam renja dan renstra disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Tabel T-C . 29) menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2026.

Tabel 3.
T-C 29 . Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2024

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD tahun 20225)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra - PD s/d tahun berjalan (2024)	
									Target RENJA - PD TAHUN (2023)	Realisasi RENJA - PD Triwulan (2023)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9) *	11=(10/4)*
2	18	1			<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</i>	88 Nilai	86 Nilai	86	94,90	110,35	94,9	276	313,41
2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja	12 dokumen	17 Dokumen	17	17	100,00	15	49	408,33
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	12 Dokumen	4 Dokumen	4	4	100,00	4	12	100,00
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100,00	4	6	600,00

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD tahun 20225)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra - PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target RENJA - PD TAHUN (2023)	Realisasi RENJA - PD Triwulan (2023)	Tingkat Realisasi (%)	8=(7/6)	9	realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2 18 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahann RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100,00	0	2	200,00
2 18 01 2.01 04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100,00	0	2	200,00
2 18 01 2.01 05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100,00	0	2	200,00
2 18 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen	6 Laporan	9 Laporan	9	9	100,00	6	24	400,00

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD tahun 20225)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra - PD s/d tahun berjalan (2024)						
			Target RENJA - PD TAHUN (2023)	Realisasi RENJA - PD Triwulan (2023)		Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*						
		perubahan RKA-SKPD														
2	18	01	2.02		Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100	Persentase	100	Persentase	100	100	100,00	100	100,00	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98	Orang/ Bulan	84	Orang/ Bulan	84	84	100,00	70	175	178,57
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	1	100,00	1	5	500,00
2	18	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Dokumen	5	Dokumen	5	5	100,00	5	15	300,00

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD tahun 20225)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra - PD s/d tahun berjalan (2024)							
					Target RENJA - PD TAHUN (2023)	Realisasi RENJA - PD Triwulan (2023)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*						
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	3	Laporan	3	Laporan	3	3	100,00	3	9	300,00
2	18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	100,00	1	3	300,00
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi BMD	15	Dokumen	5	Dokumen	5	5	100,00	100	110	733,33
2	18	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	1	2	1	50,00	1	3	300,00
2	18	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2	Laporan	4	4	4	4	100,00	4	12	600,00

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD tahun 20225)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra - PD s/d tahun berjalan (2024)					
					Target RENJA - PD TAHUN (2023)	Realisasi RENJA - PD Triwulan (2023)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*				
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian	1 Persentase	100 Persentase	100	100	100,00	100	204	204,00
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	300 Paket	2 Paket	2	2	100,00	4	24	8,00
2	18	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	100 Dokumen	100	100	100,00	4	204	20400,00
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang	15 Orang	15	15	100,00	20	50	333,33
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	75 Orang	102 Orang	102	102	100,00	150	354	472,00
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100 Persentase	100 Persentase	100	100	100,00	100	300	300,00

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD tahun 20225)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra - PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target RENJA - PD TAHUN (2023)	Realisasi RENJA - PD Triwulan (2023)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 Paket	70 Paket	70	70	100,00	1	142	405,71
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	25 Paket	40 Paket	40	40	100,00	1	92	368,00
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	22	22	100,00	2	56	254,55
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	500 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100,00	12	502	100,40
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 Laporan	400 Laporan	400	400	100,00	12	812	406,00
2 18 01 2.06 10	Pengelolaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	500 Dokumen	500 Dokumen	500	500	100,00	500	1500	300,00

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD tahun 20225)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra - PD s/d tahun berjalan (2024)					
					Target RENJA - PD TAHUN (2023)	Realisasi RENJA - PD Triwulan (2023)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*				
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan BMD	100 Persentase	100 Persentase	100	100	100,00	100	300	300,00
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Unit	46 Unit	46	46	100,00	70	95	950,00
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa	100 Persentase	100 Persentase	100	100	100,00	100	300	300,00
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	2 Laporan	2	2	100,00	3	16	0,64
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12	12	100,00	12	48	400,00
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	3 Laporan	3	3	100,00	12	18	36,00

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD tahun 20225)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra - PD s/d tahun berjalan (2024)							
					Target RENJA - PD TAHUN (2023)	Realisasi RENJA - PD Triwulan (2023)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*						
18	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49	Laporan	12	Laporan	12	12	100,00	24	48	97,96
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD	108	Persentase	100	Persentase	100	100	100,00	100	300	277,78
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	48	Unit	48	Unit	48	48	100,00	144	240	500,00
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	60	Unit	60	Unit	60	60	100,00	60	180	300,00
2	18	02			<i>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Proyek (PMA/PMDN)</i>	<i>3267</i>	<i>Proyek</i>	<i>640</i>	<i>Proyek</i>	<i>640</i>	<i>1703</i>	<i>266,09</i>	<i>665</i>	<i>3008</i>	<i>92,07</i>
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kajian dan peta potensi investasi</i>	<i>1</i>	<i>Dokumen</i>	<i>3</i>	<i>Dokumen</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>100,00</i>	<i>1</i>	<i>7</i>	<i>700,00</i>

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD tahun 20225)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra - PD s/d tahun berjalan (2024)							
					Target RENJA - PD TAHUN (2023)	Realisasi RENJA - PD Triwulan (2023)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*						
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	100,00	1	3	300,00
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	1	Dokumen	3	3	3	3	100,00	1	7	700,00
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	350	Investor	260	Investor	260	284	109,23	340	884	252,57
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	1460	Investor	112	Investor	260	284	109,23	340	854	58,49
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	1	Dokumen	2	Dokumen	2	2	100,00	1	5	500,00
2	18	02	2.02	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman	4	Dokumen	5	Dokumen	5	4	80,00	4	13	325,00

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD tahun 20225)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra - PD s/d tahun berjalan (2024)	
									Target RENJA - PD TAHUN (2023)	Realisasi RENJA - PD Triwulan (2023)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
						Modal Kabupaten/Kota								
2	18	04			<i>Program Pelayanan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Penerbitan Izin</i>	4750 Izin	1000 Izin	1000	12.796	1279,60	12000	25796	543,07
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	87,12 Nilai	87,75	91,96	101,53	91,96	271,04	294,61
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	2000 Pelaku Usaha	2000	2000	100,00	500	4500	900,00

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD tahun 20225)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra - PD s/d tahun berjalan (2024)							
					Target RENJA - PD TAHUN (2023)	Realisasi RENJA - PD Triwulan (2023)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*						
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	500	Kegiatan Usaha	300	Kegiatan Usaha	300	300	100,00	500	1100	220,00
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan	500	Orang	300	Orang	100	100	100,00	500	300	60,00
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	500	Kegiatan Usaha	500	Kegiatan Usaha	500	500	100,00	500	1500	300,00

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD tahun 20225)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra - PD s/d tahun berjalan (2024)							
					Target RENJA - PD TAHUN (2023)	Realisasi RENJA - PD Triwulan (2023)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*		
2	18	05			<i>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Kenaikan /Penurunan Nilai Realisasi PMDN</i>	2	<i>Persentase</i>	30,5	<i>Persentase</i>	30,47	30,47	100,00	30,68	61,25	3062,50
2	18	05	2.01		<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pengendalian PMDN/PMA</i>	2240	<i>Jumlah Usaha/ Kegiatan</i>	300	<i>Jumlah Usaha/ Kegiatan</i>	550	550	100,00	1020	2.120	94,64
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	550	Kegiatan Usaha	100	Kegiatan Usaha	100	100	100,00	100	300	54,55
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	500	Pelaku Usaha	300	Pelaku Usaha	300	300	100,00	100	700	140,00

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD tahun 20225)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra - PD s/d tahun berjalan (2024)							
					Target RENJA - PD TAHUN (2023)	Realisasi RENJA - PD Triwulan (2023)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1					6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*						
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan	250	Kegiatan Usaha	100	Kegiatan Usaha	100	100	100,00	100	300	120,00
2	18	06			<i>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Aplikasi</i>	3	<i>Aplikasi</i>	3	<i>Aplikasi</i>	3	4	133,33	3	10	333,33
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Aplikasi</i>	15	<i>Aplikasi</i>	3	<i>Aplikasi</i>	3	4	133,33	3	10	66,67
2	18	06	2.01	01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	80	Dokumen	4436	Dokumen	4436	4436	100,00	3	8875	11093,75

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara seluruh program kegiatan yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah tercapai di tahun 2024. Dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diamanatkan untuk:

1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN/ PMA
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama kurun waktu Januari-Desember 2023 berhasil mencatat realisasi investasi sebesar Rp. 14,80 T, berhasil mencapai 204% dari target yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara sebesar Rp. 7,2 T.

Sejalan dengan keberadaan kebijakan pemerintah untuk hilirisasi sumber daya alam dan Ibu Kota Negara membuat peningkatan investasi meningkat setiap tahunnya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sepanjang tahun 2023 telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 10.871, dimana penerbitan NIB ini terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2018 sebanyak 274 sejalan dengan fokus pemerintah untuk mengembangkan pelaku UMKM.

Termasuk dalam amanat tersebut adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang urusan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dimana nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91,96 terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Indikator kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara terletak pada sasaran pembangunan dalam renstra. Indikator kinerja pelayanan

merupakan indikator kinerja yang bersifat hasil (outcome) dan menggambarkan indikator kinerja program-program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud. Indikator kinerja pelayanan ini dapat berupa indikator kinerja standar pelayanan minimal (SPM), indikator kinerja kunci (IKK) maupun indikator yang dikreasikan guna mengukur tingkat layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan pada Tabel T-C.30. (terlampir). Termasuk dalam analisis tersebut adalah proyeksi kinerja pelayanan tahun rencana dan satu tahun maju.

Tabel 4
T - C .30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/s tandar nasion al	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi		Catata n Analisi s
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah/target Penanaman Modal PMDN/PMA (Trilyun Rupiah)			7	7,2	7,35	7,4	7,45	14,80	15,10	15,35	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			87,12	87,75	88,25	89,52	91,73	91,96	93	95,20	

Sumber Data : Renstra DPMPTSP

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh

Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang diberikan oleh Bupati; dan
- f. penyusunan laporan di Bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Sesuai dengan tugas dan fungsi di atas maka DPMPTSP juga bertanggungjawab untuk menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan pelayanan yang terpadu bagi Masyarakat maupun investor. Melalui Langkah-Langkah seperti penerapan teknologi informasi, pelatihan pegawai dan peningkatan transparansi sistem birokrasi.

2.3.2 Pengembangan perekonomian berkelanjutan

Dalam Pengembangan Perekonomian berkelanjutan DPMPTSP memainkan peran penting dalam memfasilitasi investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta DPMPTSP dapat mempromosikan praktik bisnis yang bertanggungjawab secara sosial dan lingkungan, mempercepat proses perizinan bagi proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta mengawasi implementasi kebijakan

lingkungan dan pembangunan pada setiap proyek yang ditangani melalui :

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik terkait Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- Memfasilitasi kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- Memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- Penyelesaian Permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha;
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi pelaku usaha dan UMK serta non UMK;
- Pengawasan Perizinan berbasis risiko dengan pengawasan (rutin terjadwal) serta pengawasan insidental (Tanpa pemberitahuan) terhadap pelaku usaha ataupun kegiatan usaha.

2.3.3 Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

- DPMPTSP mempunyai Peran yaitu memfasilitasi proses percepatan perizinan bagi investor ataupun pemangku kepentingan yang terlibat pada proyek-proyek yang mendukung Pembangunan IKN sebagai mitra sesuai kewenangan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Pembuatan Peta Potensi Zona Industri Pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN);
- Memfasilitasi kerjasama kemitraan usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi kewenangan Kutai Kartanegara untuk mendukung kebutuhan pembangunan IKN.

Untuk menjawab Isu-Isu tersebut peran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara dan terhadap Capaian Program Daerah Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026,

ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara
***“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan
Berbahagia “***

Dengan Misi Bupati Kutai Kartanegara, yaitu

1. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani.
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah.
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya reviu terhadap rancangan awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsisten substansi Renja DPMPTSP dengan berbagai rumusan yang tertuang dalam rancangan awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target Program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Pada akhirnya renja OPD juga akan mengalami Penyempurnaan setelah rancangan RKPD tersebut telah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati. Hasil telaahan terhadap Reviu rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 5
T-C 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal				20.433.370.644,00					27.786.705.030,00	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	94,90 Nilai	16.133.370.644,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	94,90 Nilai	18.856.822.130,00	
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	13 Dokumen	1.195.423.000,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	19 Dokumen	1.192.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	4 Dokumen	571.836.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	5 Dokumen	592.000.000,00	Penambahan Pagu Anggaran dilakukan untuk paket pekerjaan Penyusunan RENSTRA PD, RENJA Perubahan 2025, RENJA 2026, RENJA ZI, dan RENJA RB
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	85.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	50.000.000,00	Pengurangan Pagu Anggaran dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	538.586.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Pengurangan Pagu Anggaran dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	150.000.000,00	Penambahan Pagu Anggaran dan Sub Kegiatan dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
5	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	-	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Penambahan Pagu Anggaran dan Sub Kegiatan dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
6	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup PD	0 Data	-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan	1 Data	250.000.000,00	Penambahan Pagu Anggaran dan Sub Kegiatan dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								dan Diperiksa Lingkup PD			
7	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Berita Acara	-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000,00	Penambahan Pagu Anggaran dan Sub Kegiatan dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
B	Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administasi Keuangan	100%	10.835.164.656,00	Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administasi Keuangan	100%	10.892.789.071,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan	70 orang/bulan	10.312.681.530,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan	66 orang/bulan	9.894.305.945,00	Pengurangan Pagu Anggaran dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA BAPPEDA, Serta Hasil Rekonsiliasi Data dan Realisasi Anggaran Dengan Bidang Anggaran BPKAD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 Laporan	65.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 Laporan	215.000.000,00	dilakukan penambahan sebesar Rp. 150.000.000 untuk penyusunan laporan keuangan akhir tahun dikarenakan kekurangan anggaran untuk Pencapaian Output

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	77.483.126,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	7 Dokumen	377.483.126,00	dilakukan penambahan sebesar Rp. 300.000.000 untuk paket pekerjaan 1. TL Inspektorat 2. TL BPK 3. Penilaian Kinerja BKPM 4. Penilaian Kinerja Kemenpan RB 5. Penilaian Kinerja Ombusmant 6. Penilaian Panji-Panji 7. Penilaian MCP KPK dikarenakan kekurangan anggaran untuk pencapaian output
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester SKPD	3 Laporan	350.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester SKPD	3 Laporan	381.000.000,00	dilakukan penambahan sebesar Rp. 31.000.000 untuk paket pekerjaan Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan SKPD dikarenakan kurangnya anggaran untuk pencapaian output kegiatan
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	30.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000,00	dilakukan pengurangan pagu penambahan sebesar Rp. 5.000.000
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dearah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administasi Barang Milik Daerah	100%	182.224.293,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dearah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administasi Barang Milik Daerah	100%	337.000.000,00	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	1 Dokumen	40.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	2 Dokumen	25.000.000,00	Dilakukan Pengurangan Pagu Anggaran Sesuai dengan Hasil Verifikasi Tim

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	1 laporan	-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	1 laporan	50.000.000,00	Penambahan Pagu Anggaran dan Sub Kegiatan dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 laporan	142.224.293,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	5 laporan	30.000.000,00	Dilakukan Pengurangan Pagu Anggaran Sesuai dengan Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	222.000.000,00	Penambahan Pagu Anggaran dan Sub Kegiatan dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
5	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Penambahan Pagu Anggaran dan Sub Kegiatan dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
D	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	-	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	20.000.000,00	
1	Perencanaan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Laporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	1 Dokumen	-	Perencanaan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Laporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	Penambahan Pagu Anggaran dan Sub Kegiatan dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	2 Dokumen	-	Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00	Penambahan Pagu Anggaran dan Sub Kegiatan dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
F	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administrasi Kepegawaian	100%	552.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administrasi Kepegawaian	100%	552.000.000,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beseta Atribut Kelengkapannya	1 paket	127.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beseta Atribut Kelengkapannya	1 paket	127.000.000,00	
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	100.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	100.000.000,00	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	75.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	75.000.000,00	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	75 Orang	250.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	75 Orang	250.000.000,00	
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administrasi umum	100%	1.254.951.019,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administrasi umum	100%	1.568.030.791,00	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	170.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	300.000.000,00	dilakukan penambahan pagu sebesar Rp. 130.000.000 untuk pengadaan ATK DPMPSTP dan MPP dikarenakan pencapaian output kegiatan
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	250.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	293.079.772,00	dilakukan penambahan pagu sebesar Rp. 43.079.772 untuk keperluan logistik DPMPSTP dan MPP dikarenakan pencapaian output kegiatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	2 paket	100.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	2 paket	250.000.000,00	dilakukan penambahan pagu sebesar Rp. 150.000.000 untuk keperluan cetak dan pengadaan DPMTSP dan MPP dikarenakan pencapaian output kegiatan
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bagan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	30.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bagan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	20.000.000,00	Dilakukan Pengurangan Pagu Anggaran Sesuai dengan Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	561.935.145,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	561.935.145,00	
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	500 Dokumen	50.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	500 Dokumen	50.000.000,00	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah kegiatan/berita	12 Dokumen	93.015.874,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah kegiatan/berita	12 Dokumen	93.015.874,00	
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	361.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	361.000.000,00	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20 Unit	361.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20 Unit	361.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	100%	1.364.757.676,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	100%	2.805.382.268,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5.599.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.000.000,00	Dilakukan Pengurangan Pagu Anggaran Sesuai dengan Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138.600.000,00	Penambahan Pagu Anggaran dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA BAPPEDA, Serta Hasil Rekonsiliasi Data dan Realisasi Anggaran Dengan Bidang Anggaran BPKAD
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.089.678.676,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.527.540.268,00	dilakukan pembahan pagu sebesar Rp.1.438.783.364 untuk 1. THL 2. Tenaga Teknis 3. Tenaga teknis Administrasi 4. jasa kebersihan dikarenakan kurang anggaran untuk pencapaian output kegiatan
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	149.480.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	136.242.000,00	dilakukan pembahan pagu sebesar Rp. 13.238.000 untuk biaya perbaikan dan pemeliharaan barang DPMPSTP dan MPP dikarenakan kurangnya anggaran untuk pencapaian output kegiatan
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang	100%	387.850.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang	100%	1.128.620.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			urusan pemerintah daerah					urusan pemerintah daerah			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	144 Unit	263.620.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	144 Unit	498.620.000,00	Dilakukan penambahan pagu sebesar Rp.235.000.000 1. BBM 2. Service 3. Suku cadang dikarenakan kurangnya anggaran untuk pencapaian output kegiatan
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	60 Unit	59.230.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	80 Unit	80.000.000,00	Dilakukan penambahan pagu sebesar Rp.20.770.000 untuk keperluan pemeliharaan 1. Komputer 2. Printer 3. Kulkas 4. TV 5. Dispenser 6. Kursi 7. Refarasi Kunci dikarenakan kurangnya anggaran untuk pencapaian output kegiatan
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	2 Unit	65.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	550.000.000,00	dilakukan penambahan pagu sebesar Rp. 485.000.000 1. Rumah Jabatan 2. Ruang Kerja Kepala Dinas 3. Ruang Rapat DPMPPTSP 4. Ruang Kerja DPMPPTSP dikarenakan untuk Penyimpanan dokumen arsip DPMPPTSP dan kenyamanan kerja
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA	665 Proyek	1.050.000.000,00	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pertumbuhan	665 Proyek	2.600.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								<i>Proyek PMDN/PMA</i>			
A	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000,00	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000,00	
1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen		
2	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	30 Dokumen	200.000.000,00	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kajian Kebijakan Daerah Perundangan di bidang Penanaman Modal	100 Dokumen	500.000.000,00	dilakukan penambahan pagu sebesar Rp. 300.000.000 dikarenakan kurangnya anggaran untuk pencapaian output
B	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Investasi	3 Dokumen	850.000.000,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Investasi	3 Dokumen	2.100.000.000,00	
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000,00	Dilakukan penambahan pagu anggaran senilai Rp. 100.000.000 untuk Pembuatan RUPM sesuai dengan Visi Misi Bupati terpilih 2025-2030
2	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah		Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran	Daerah		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								data potensi investasi			
3	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	650.000.000,00	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.800.000.000,00	dilakukan penambahan pagu sebesar Rp. 1.150.000.000 untuk menambah aut put kegiatan berupa Investemnt Project Ready to Over (IPRO) potensi investasi melalui promosi yang ditawarkan untuk menarik calon investor di kab. Kutai Kartanegara
III	Program Promosi Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	340 Investor	1.200.000.000,00	Program Promosi Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	340 Investor	1.550.000.000,00	
A	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	340 Investor	1.200.000.000,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	340 Investor	1.550.000.000,00	
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	2 Dokumen	600.000.000,00	dilakukan penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 400.000.000 untuk melakukan penyusunan Analisis Negara Sumber Modal Asing dan pembuatan video promosi penanaman modal, serta pembuatan Video Promosi Layanan MPP Kutai Kartanegara
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.000.000.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	950.000.000,00	Dilakukan Pengurangan Pagu Anggaran Sesuai dengan Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penerbitan Izin	10.000 Izin	850.000.000,00	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penerbitan Izin	12.000 Izin	1.650.000.000,00	
A	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,96 Nilai	850.000.000,00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,96 Nilai	1.650.000.000,00	
1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	200.000.000,00	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	1200 Pelaku Usaha	600.000.000,00	dilakukan penambahan pagu sebesar Rp. 400.000.000 dari kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah karena kurangnya anggaran untuk pencapaian output kegiatan
2	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	200.000.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	450.000.000,00	dilakukan penambahan pagu sebesar Rp. 250.000.000 karena sebelumnya tidak cukup untuk SKM Eksternal dan IPK MPP

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	300 Kegiatan Usaha	450.000.000,00	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	650 Kegiatan Usaha	600.000.000,00	dilakukan penambahan pagu sebesar Rp.150.000.000 karena pagu anggaran untuk pencapaian output
V	<i>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>Penaikan / Penurunan Nilai Realisasi (PMDN)</i>	<i>30.75%</i>	<i>700.000.000,00</i>	<i>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>Penaikan / Penurunan Nilai Realisasi (PMDN)</i>	<i>30.68%</i>	<i>1.200.000.000,00</i>	
A	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengendalian PMA / PMDN	300 Pelaku usaha/kegiatan usaha	700.000.000,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengendalian PMA / PMDN	1020 Pelaku usaha/kegiatan usaha	1.200.000.000,00	
1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	100 Kegiatan Usaha	200.000.000,00	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan	100 Kegiatan Usaha	200.000.000,00	
2	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	100 Pelaku Usaha	200.000.000,00	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	400 Kegiatan Usaha	600.000.000,00	Dilakukan penambahan pagu anggaran sebesar 400.000.000,00 untuk pencapaian outcome

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	24 Kegiatan Usaha	300.000.000,00	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan Usaha	400.000.000,00	dilakukan penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000 karena anggaran kurang untuk pencapaian output kegiatan
VI	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aplikasi	3 Aplikasi	500.000.000,00	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aplikasi	3 Aplikasi	1.929.882.900,00	
A	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aplikasi	3 Aplikasi	500.000.000,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aplikasi	3 Aplikasi	1.929.882.900,00	
1	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	500.000.000,00	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji	10 Dokumen	1.929.882.900,00	dilakukan penambahan pagu sebesar Rp.1.429.882.900 untuk pengembangan dan maintance terhadap aplikasi yang ada, baik untuk DPMPTSP dan MPP serta Rehap Drive True dan Pembuatan Taman Pada MPP

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Dan Dimanfaatkan			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Jangka Panjang Nasional di Bidang Investasi Tahun 2025-2045 Menuju Indonesia Emas 2045 yaitu “Negara Nusantara berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” dimana Negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradapan bahari sebagai poros maritim dunia. Dimana berdaulat itu sendiri terdiri dari Ketahanan, Kesatuan, Mandiri dan aman bagi para investor. Maju dimana berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil bagi semua pihak baik itu masyarakat maupun investor. Berkelanjutan dimana Investasi yang ditawarkan merupakan investasi yang lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. 5 (Lima) sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yaitu:

1. Pendapatan Perkapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia Internasional meningkat;
4. Daya saing Sumber daya manusia meningkat; dan
5. Intensitas Emisi GRK menurun menuju Net zero emission.

Dan untuk mendukung lima misi tersebut terdapat 8 (Delapan) misi (Agenda) Pembangunan 2045 yaitu:

Transformasi Indonesia

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;

3. Transpormasi tata kelola.

Landasan Transpormasi

4. Supermasi Hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia;
5. Ketahanan Sosial Budaya dan ekologi.

Kerangka Implementasi Transpormasi

6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan bereadilan;
7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
8. Kestinambungan Pembangunan

Untuk mewujudkan visi Indonesia emas Tahun 2045 kementerian Investasi/BKPM membuat arah kebijakan Investasi yaitu:

1. Investasi yang diprioritaskan untuk mengembangkan industri prioritas, mendukung transpormasi digital, modernisasi dan digitalisasi pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, industri kreatif dan pariwisata;
2. Investasi berorientasi ekspor yang dapat mengembangkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dan meningkatkan partisipasi dalam rantai produksi global;
3. Investasi hijau untuk mempercepat penerapan ekonomi hijau terutama percepatan transisi, energi, implementasi ekonomi sirkular, pengembangan transpormasi hijau dan adopsi teknologi hijau;
4. Investasi dalam infrastruktur konektifitas dan logika untuk mendorong integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global;
5. Invetasi yang berorientasi riset dan inovasi;

6. Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Investasi Pusat-daerah dengan kebijakan ketenagakerjaan, energi, perdagangan, tata ruang, fiskal dan pembiayaan;
7. Iklim Investasi dan kepastian berusaha yang mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing;
8. Efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi agar lebih tepat sasaran dan transparan, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor dan wilayah;
9. Fasilitas Investasi Indonesia di luar negeri dengan pemanfaatan jaringan diaspora Indonesia.

Untuk mendukung arah kebijakan Nasional tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan melakukan :

1. Mendorong Investasi yang mengembangkan industri prioritas, mendukung transformasi digital, modernisasi dan digitalisasi pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, industri kreatif dan pariwisata;
2. Membuat Peta potensi berstandar IPRO untuk green Investasi dan Blue Investasi;
3. Meningkatkan Iklim Investasi dan kepastian berusaha yang mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing;
4. Mendorong Percepatan PERDA Pemberian insentif dan kemudahan Berusaha di Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dengan menciptakan inovasi-inovasi baru sehingga mempermudah pelaku usaha dan stakeholder dalam pengurusan perizinan;

6. Meningkatkan SDM Aparatur pada DPMPTSP dan MPP;
7. Menjalin koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan selaras terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Koordinasi dan komunikasi antar instansi ini melibatkan Dinas / Instansi Teknis dan pihak-pihak terkait lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Dalam mendukung visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara (2021 – 2026), tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara tahun 2025 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu misi 1 dan 3:

Misi 1

“Memantapkan Birokrasi yang Bersih Efektif, Efisien dan Melayani “

Misi 3

“Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif “.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran

dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, yaitu "Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA" dengan indikator tujuan "Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA" dan tujuan "Meningkatkan Kualitas Pelayanan di DPMPTSP" dengan Indikator "Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)". Keterpaduan kedua indikator tersebut menuju pada Meningkatkan Daya Saing Investasi Daerah pada RPJMD 2021-2026. Seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 6
Tujuan dan Sasaran
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai
Kartanegara Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4
1	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan di DPMPTSP	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dan untuk tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan target kinerja perangkat daerah yaitu pada tabel;

Tabel 7
TARGET DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	Target Renstra SKPD				
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) Triliun Rupiah	7	7,2	7,35	7,4	7,45
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan di DPMPTSP	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,12	87,75	88,25	89,52	91,73

Sumber Data : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor- Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai garda depan investasi di Kutai Kartanegara, menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk meningkatkan daya saing investasi daerah pada PMDN maupun PMA dan memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha dengan mengadakan pendampingan kepada pelaku usaha melalui inovasi PILOT (Pelayanan Izin *On The Spot*) dan Aplikasi PELONGSENG sebagai sarana pelayanan kepada semua *stakeholder* di Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mendukung misi 1 Bupati Kutai Kartanegara yaitu Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani dan misi 3 Bupati Kutai Kartanegara yaitu Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

1. Permasalahan dan Hambatan

Dalam rangka menjalankan program-program tersebut DPMPTSP juga menemukan beberapa permasalahan dan hambatan, berdasarkan Tugas dan Fungsi beberapa permasalahan dan hambatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain:

- Regulasi yang masih selalu berubah – ubah;
- Aplikasi Sistem Perizinan Berusaha masih dalam proses pengembangan;
- Kurangnya anggaran dalam pencapaian output;
- Kurangnya sinergisitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka mewujudkan perbaikan iklim investasi;
- Belum Efektifnya Pengawasan penanaman modal;
- Belum adanya kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
- Belum tersediannya data dan peta potensi investasi menuju sektor hilirisasi yang bersandar IPRO (Investment Project To Over);
- Belum adanya ISO 27001 tentang Keamanan Data Perizinan berbasis risiko baik itu di DPMPTSP dan di MPP;
- Belum adanya ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan baik itu di DPMPTSP maupun di MPP.

2. Tantangan dan Peluang

Dalam Meningkatkan Pelayanan perizinan dan investasi di Kutai Kartanegara, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi tantangan, antara lain:

- Data peta potensi investasi belum berstandar IPRO sehingga informasi yang diberikan belum akurat dan belum tersebar luas kepada para pelaku usaha sehingga belum dapat menjual potensi di Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Peraturan Daerah tentang pemberian insentif fasilitas kemudahan Penanaman Modal belum juga disahkan menjadi PERDA Pemberian Fasilitas/Insentif Kemudahan Berusaha;
- Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi;
- Tingginya target realisasi investasi dalam bidang Penanaman Modal;
- Tingginya target rasio pertumbuhan investasi dalam bidang Penanaman Modal;
- Adanya ketidak sinkronisasi regulasi terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan antar K/L;
- Kurangnya SDM yang handal dalam proses pelayanan perizinan dan investasi.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Besarnya dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap penanaman modal dan perizinan;
- b. Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara dan iklim yang baik, sangat mendukung investasi di sektor pariwisata, pertambangan, perkebunan, pertanian dan perikanan.
- c. Posisi geografis yang strategis karena sebagai IKN
- d. Infrastruktur transportasi yang mulai membaik.

3. Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Prioritas Tahun 2025 Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan realisasi investasi PMDN dan PMA, serta

pertumbuhan dan persebaran penanaman modal yang berorientasi kepada pengembangan potensi unggulan daerah dengan melakukan kajian peta potensi yang berstandar IPRO sehingga bisa menjual kepada para investor.

Beberapa langkah strategis yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal mengatasi masalah dan hambatan yang menjadi isi – isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu yaitu:

1. Penyusunan strategi dan peningkatan promosi penanaman modal yang lebih inovatif;
2. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan Berbasis Risiko dengan inovasi baru dibidang pelayanan perizinan;
3. Mengkoordinasikan RAPERDA investasi dalam pemberian insentif dan fasilitas kemudahan Penanaman Modal menjadi PERDA;
4. Peningkatan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi dengan SPAN Laporan;
5. Pemutakhiran data peta potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten Kutai Kartanegara berstandar IPRO;
6. Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
7. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (ASN dan Non ASN) pada DPMPSTP dan MPP;

8. Melakukan Sertifikasi ISO 27001 tentang Keamanan Data dan ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan baik itu di DPMPTSP maupun di MPP;
9. Meningkatkan Kemitraan Pelaku UMKM dengan Pengusaha besar.

Dengan menjalankan Program dan Kegiatan yaitu :

- (1) Program Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal,
 - Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota;
 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
- (2) Program Promosi Penanaman Modal
 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Program Pelayanan Penanaman Modal,
 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dearah Kabupaten/Kota.
- (5) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Risiko yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Oleh karena itu dalam pendanaan lebih difokuskan pada program dan kegiatan yang memiliki manfaat bagi Peningkatan realisasi Investasi dan peningkatan pelayanan perizinan berbasis risiko serta digambarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang akan digunakan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal;

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.600.000.000 Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Penanaman Modal, yang terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 500.000.000 Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Fasilitasi Kemitraan Yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000.
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Kegiatan 2),
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.100.000.000 Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 1.800.000.000;
- 2) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 300.000.000.

2. Program Promosi Penanaman Modal;

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.550.000.000 Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Penanaman Modal, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 600.000.000;
- 2) Penyusunan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 950.000.000.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal;

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.650.000.000 Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Pelayanan Perizinan, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik dengan anggaran Rp. 600.000.000;
- 2) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko dengan anggaran Rp. 600.000.000;
- 3) Penyediaan dan Pengelolaan layanan Konsultasi Perizinan Berbasis Risiko dengan anggaran sebesar Rp. 450.000.000.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.200.000.000 Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Penanaman Modal, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya dengan anggaran Rp. 200.000.000;
- 2) Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000;
- 3) Pengawasan Penanaman Modal dengan anggaran Rp. 400.000.000.

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.929.882.900 Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Pelayanan Perizinan yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 1.929.882.900.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan program yang berfokus pada kegiatan-kegiatan rutin penunjang penyelenggaraan pemerintahan anggaran untuk program ini sebesar Rp. 18.856.822.130. yang meliputi 9 kegiatan dan 38 sub kegiatan yang diantaranya terdiri dari:

- a. Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah terdiri dari 7 sub. Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.192.000.000 sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 592.000.000
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD anggaran sebesar Rp. 50.000.000
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000
 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000
 5. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000
 6. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000
 7. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 10.892.789.071 sebagai berikut :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 9.894.305.945;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 215.000.000;
 3. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa dengan anggaran sebesar Rp. 377.483.126 ;

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 381.000.000;
 5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000.
- c. Kegiatan administrasi Barang Milik Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 337.000.000 sebagai berikut :
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000;
 2. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000;
 3. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000;
 4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 222.000.000;
 5. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000;
 6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.
- d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah terdiri dari
- 2 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000 sebagai berikut:
1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000;
 2. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.

- e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 4 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 552.000.000 sebagai berikut :
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya dengan anggran sebesar Rp. 127.000.000;
 2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000;
 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000;
 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perudang – Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000.
- f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 7 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.568.030.791 sebagai berikut :
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000;
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 293.079.772;
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000;
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000;
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp.561.935.145;
 6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000;

7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 93.015.874.
- g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 361.000.000 sebagai berikut :
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 361.000.000.
- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 4 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.128.620.000 sebagai berikut:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 138.600.000;
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 2.527.540.268;
 4. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 136.242.000.
- i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.128.620.000
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 498.620.000;

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 550.000.000.

Hasil RENJA 2025 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara dari kegiatan dalam program ini nantinya akan memudahkan investor dalam menentukan nilai investasi dan menjadi acuan pengukuran kenaikan/ penurunan nilai realisasi investasi. Program pelayanan penanaman modal berfokus pada kegiatan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah Kutai Kartanegara. Kegiatan ini bertujuan memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi investor dan akses pengaduan masyarakat. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal berfokus pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, bertujuan untuk Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal berfokus pada kegiatan urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 disusun dengan memperhatikan target capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

c. Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 Untuk tahun 2025 terdiri dari 6 (Enam) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan kebutuhan dana sesuai dengan pagu indikatif Rp. 20.433.370.644,00 dan telah diusulkan Pagu Indikatif menjadi Rp. **27.786.705.030,00** yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan paket- paket pekerjaan penunjang pencapaian *outcome* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun rincian kegiatan program, keuangan dan asset sebagai berikut :

Tabel. 8
T-C . 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PERTUMBUHAN INVESTASI DAERAH	Kab. Kutai Kartanegara	30,75	27.786.705.030,00	APBD		30,9	32.621.208.213,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Kab. Kutai Kartanegara	94,90 Nilai	18.856.822.130,00	APBD		94,90 Nilai	21.421.208.213,00
18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	19 Dokumen	1.192.000.000,00	APBD		19 Dokumen	1.250.000.000,00
18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Kab. Kutai Kartanegara	5 Dokumen	592.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Penyusunan RENJA 2027, RENJA Perubahan 2026, RENJA ZI, dan RENJA RB	4 Dokumen	350.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	50.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran Untuk Paket Pekerjaan Penyusunan Dokumen RKA 2027, RKA Perubahan 2026, DPA 2027 dan DPA Perubahan 2026	4 Dokumen	100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran Untuk Paket Pekerjaan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi(Per Bulan), Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi (Per Triwulan), Laporan Mitigasi Risiko 2027, Laporan Pelaksanaan Mitigasi Risiko 2026 (Per Triwulan), Laporan Maturitas SPIP	5 Laporan	400.000.000,00
18 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	150.000.000,00	APBD		1 laporan	150.000.000,00
18 01 2.01 0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD		1 Dokumen	50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
18	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup PD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Data	250.000.000,00	APBD	Dilakukan Pengurangan Pagu Anggaran dikarenakan Penyesuaian antara Paket Pekerjaan dan Capaian Output	1 Data	150.000.000,00
18	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Berita Acara	50.000.000,00	APBD		1 Berita Acara	50.000.000,00
18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kab. Kutai Kartanegara	100%	10.892.789.071,00	APBD		100%	10.615.305.945,00
18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	66 orang/ bulan	9.894.305.945,00	APBD		66 orang/ bulan	9.894.305.945,00
18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	215.000.000,00	APBD		1 Laporan	215.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
18	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	7 Dokumen	377.483.126,00	APBD	Dilakukan Pengurangan Pagu Anggaran dikarenakan Penyesuaian antara Paket Pekerjaan dan Capaian Output	2 Dokumen	100.000.000,00
18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	381.000.000,00	APBD		12 Laporan	381.000.000,00
18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	25.000.000,00	APBD		1 Dokumen	25.000.000,00
18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	100%	337.000.000,00	APBD		100%	337.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
18	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	25.000.000,00	APBD		2 Dokumen	25.000.000,00
18	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	50.000.000,00	APBD		1 laporan	50.000.000,00
18	01	2.03	04	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	4 laporan	30.000.000,00	APBD		4 laporan	30.000.000,00
18	01	2.03	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 laporan	222.000.000,00	APBD		12 laporan	222.000.000,00
18	02	2.03	06	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	10.000.000,00
18	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100%	20.000.000,00	APBD		100%	110.000.000,00
18	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Laporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	10.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	01	2.04	0002	Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	10.000.000,00	APBD		12 Dokumen	100.000.000,00
18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	100%	552.000.000,00	APBD		100%	1.562.500.000,00
18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	127.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Pakaian Miskat, Batik dan Olahraga	3 Paket	562.500.000,00
18	01	2.05	06	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	100.000.000,00	APBD		4 Dokumen	100.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	15 Orang	75.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Diklat Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bid. Sekretariat, Bid. PTSP, dan Bid. PM (Regulasi Perizinan Berusaha harus menyesuaikan dengan beberapa Kementerian)	30 Orang	400.000.000,00
18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	75 Orang	250.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Bimbingan Teknis Exelence Service, Bimtek dan Sertifikasi Barang dan Jasa	150 Orang	500.000.000,00
18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100%	1.568.030.791,00	APBD		100%	2.470.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
										(1)	(2)	(3)
18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 paket	300.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Penyediaan ATK DPMPSTP dan Penyediaan ATK MPP	2 paket	350.000.000,00
18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 paket	293.079.772,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu anggaran untuk Paket Pekerjaan Makan Minum Rapat DPMPSTP; Paket Pekerjaan Penyediaan Makan Minum Rapat MPP dan Penyediaan Bahan Logistik Kantor DPMPSTP dan Penyediaan Logistik MPP	1 paket	500.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2 paket	250.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Penyediaan Cetak dan Pengadaan DPMPTSP dan Penyediaan Cetak dan Pengadaan MPP	2 paket	350.000.000,00
18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	20.000.000,00	APBD		12 Dokumen	20.000.000,00
18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	561.935.145,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu anggaran untuk rapat- Rapat Koordinasi DPMPTSP dan MPP sesuai Verifikasi undangan masuk pada Perangkat daerah	12 Laporan	1.000.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinas Pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	500 Dokumen	50.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu anggaran Untuk Paket Pekerjaan Jasa Pihak ketiga penyusunan Arsip Dinamis dikarenakan DPMPSTSP tidak mempunyai Arsiparis sesuai dengan Rekomendasi ANDRI	500 Dokumen	250.000.000,00
18	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	93.015.874,00	APBD	Dilakukan Pengurangan Pagu anggaran dikarenakan kegiatan ini tidak direkomendasikan oleh Diskominfo sebagai Penanggungjawab kegiatan PPID	12 Dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100%	361.000.000,00	APBD		78 Unit	750.000.000,00
18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	20 Unit	361.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu anggaran untuk Paket Kegiatan Pengadaan Personal Komputer 10 unit; Printer 10 Unit; RAK Arsip 50 Unit; Mixer 1 set; Penghancur Kertas 5 Unit ; Kursi Pijat MPP 2 Unit;	78 Unit	750.000.000,00
18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan jasa tenaga Pendukung Non PNS	Kab. Kutai Kartanegara	100%	2.805.382.268,00	APBD		100%	2.816.782.268,00
18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	3.000.000,00	APBD		3 Laporan	3.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	138.600.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran Karena Penambahan Jaringan Internet untuk penggunaan Aplikasi	12 Laporan	150.000.000,00
18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	24 Laporan	136.242.000,00	APBD		24 Laporan	136.242.000,00
18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	2.527.540.268,00	APBD		12 Laporan	2.527.540.268,00
18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100%	1.128.620.000,00	APBD		100%	1.509.620.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara	144 Unit	498.620.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan pagu Anggaran Untuk Paket Pekerjaan Pembayaran BBM, Suku Cadang dan Sewa Kendaraan Operasional Lapangan Roda 4 sebanyak 2 Unit.	144 Unit	659.620.000,00
18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	80 Unit	80.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran Untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan Mesin DPMPSTP dan MPP	60 unit	100.000.000,00
18	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	3 Unit	550.000.000,00	APBD	Dilakukan Panambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Rehap Rumah Jabatan, DMPTSP dan MPP	4 Unit	750.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Proyek (PMA/PMDN)	Kab. Kutai Kartanegara	665 Proyek	2.600.000.000,00	APBD		685 Proyek	3.000.000.000,00
18	02	2.01		<i>Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>APBD</i>		<i>2 Dokumen</i>	<i>950.000.000,00</i>
18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Dokumen	-	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10 Dokumen	300.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar	Kab. Kutai Kartanegara	100 Dokumen	500.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	120 Dokumen	650.000.000,00
18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Peta Potensi Investasi	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	2.100.000.000,00	APBD		Dokumen	2.050.000.000,00
18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	300.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	650.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	02	2.02	03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Kab. Kutai Kartanegara	Daerah	-	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	20 Daerah	200.000.000,00
18	02	2.02	04	Penyusunan Peta Ponsi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	1.800.000.000,00	APBD	Dilakukan Pengurangan Pagu Anggaran dikarenakan penyesuaian Paket Pekerjaan (Penyusunan Peta Ponsi Investasi Kabupaten/ Kota) dengan Capaian Output	3 Dokumen	1.200.000.000,00
18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	Kab. Kutai Kartanegara	340 Investor	1.550.000.000,00	APBD		350 Investor	3.200.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	Kab. Kutai Kartanegara	340 Investor	1.550.000.000,00	APBD		350 Investor	3.200.000.000,00
18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	6 Dokumen	950.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	6 Dokumen	2.500.000.000,00
18	03	2.01	03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman ModalKewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	600.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	2 Dokumen	700.000.000,00
18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM	Kab. Kutai Kartanegara	92 Nilai	1.650.000.000,00	APBD		91,96 Nilai	1.850.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin	Kab. Kutai Kartanegara	12500 Izin	1.650.000.000,00	APBD		12.600 Izin	1.850.000.000,00
18	04	2.01	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	1200 Kegiatan Usaha	600.000.000,00	APBD		1200 Kegiatan Usaha	600.000.000,00
18	04	2.01	08	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	100 Kegiatan Usaha	450.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200 Kegiatan Usaha	500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
18	04	2.01	07	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Kutai Kartanegara	650 Kegiatan Usaha	600.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	1200 Kegiatan Usaha	750.000.000,00
18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penaikan /Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Kab. Kutai Kartanegara	30.75%	1.200.000.000,00	APBD		10%	2.300.000.000,00
18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian PMA/PMDN	Kab. Kutai Kartanegara	1020 Pelaku usaha/kegiatan usaha	1.200.000.000,00	APBD		1000 Pelaku usaha/Kegiatan Usaha	2.300.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	05	2.01	04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara	100 Kegiatan Usaha	200.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	250 Kegiatan Usaha	500.000.000,00
18	05	2.01	05	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Kutai Kartanegara	400 Pelaku Usaha	600.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	550 Pelaku Usaha	1.000.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	05	2.01	06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	100 Kegiatan Usaha	400.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Pengawasan Penanaman Modal	200 Kegiatan Usaha	800.000.000,00
18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Tersedianya data dan informasi Perizinan Berusaha Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	3 Aplikasi	1.929.882.900,00	APBD	Persentase	100%	850.000.000,00
18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya data dan informasi Perizinan Berusaha Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	3 Aplikasi	1.929.882.900,00	APBD		100%	850.000.000,00
18	06	2.01	01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Kutai Kartanegara	10 Dokumen	1.929.882.900,00	APBD	Dilakukan Penurunan Pagu Anggaran karena telah disesuaikan Paket pekerjaan dengan Capaian Output	10 Dokumen	850.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya, yang merupakan dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan dapat menunjang pencapaian visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara

***“ Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan
Berbahagia ”***

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Rencana kerja Tahun 2025 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai

Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara ini berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara;

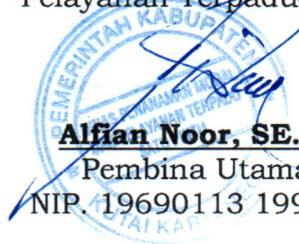
3. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Demikian Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan dalam R-APBD Tahun Anggaran 2025 mendatang.

Tenggarong, 05 Agustus 2024
Kepala,
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Alfian Noor, SE.,M.Ling.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690113 199305 1 005